

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengurangan kesenjangan menjadi salah satu fokus tujuan yang ingin dicapai oleh semua negara (Arzaqi & Astuti, 2019). Hal ini tercermin dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang disepakati oleh semua pemimpin negara yang mewakili negara-negara di seluruh dunia. SDGs adalah tujuan pembangunan baru menggantikan MDGs (*Millenium Development Goals*) yang ada sebelumnya pada tahun 2015. SDGs bertujuan untuk membantu ketertinggalan pembangunan di berbagai negara di seluruh dunia dengan target tahun 2015 hingga 2030. Penurunan kesenjangan menjadi target SDGs nomor 10. Dalam SDGs memuat 17 tujuan yang mencakup prosedur bagaimana masyarakat dapat hidup dengan damai tanpa kekerasan, bebas dari diskriminasi, memiliki partisipasi aktif, serta adanya pemerintahan yang transparan untuk kerja sama antara berbagai pihak.

Tujuan dari pembangunan berkelanjutan memiliki peranan yang sangat krusial bagi sebuah negara, terutama untuk Indonesia. Partisipasi dari masyarakat serta pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk mendukung peran SDGs. Melalui tujuan pembangunan berkelanjutan ini, Indonesia berpotensi untuk menjadi negara yang maju, mampu berkembang dalam berbagai bidang, serta dapat melaksanakan dan menerapkan prinsip ekonomi yang berkelanjutan dengan cara yang baik dan menyeluruh, sehingga Indonesia dapat menjadi negara maju yang seutuhnya.

Salah satu tujuan utama dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu mengatasi kesenjangan, termasuk di dalamnya kesenjangan distribusi pendapatan

yang masih menjadi tantangan besar di banyak negara, baik negara yang maju maupun berkembang. Hal ini dikarenakan sangat tidak mungkin setiap orang dalam suatu masyarakat untuk mendapatkan pendapatan yang sama. Hal ini terlihat dari adanya peluang dan manfaat yang bervariasi tergantung pada status sosial yang berbeda di masyarakat. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika masalah kesenjangan selalu muncul di hampir setiap wilayah, baik di negara berkembang maupun di negara yang maju sekalipun (Aziz et al., 2025). Di Indonesia, isu ini menjadi perhatian yang serius karena tingginya tingkat kesenjangan dapat menghambat pertumbuhan yang inklusif dan memicu ketidakstabilan sosial.

Pada faktanya, timbulnya ketidakmerataan disebabkan oleh pembangunan atas ekonomi yang tidak merata di dalam suatu daerah atau negara. Hal ini tentu berdampak pada kesejahteraan yang dinilai dari pendapatan yang diperoleh dari per kapita penduduk yang tidak sama, bahkan bisa menyebabkan ketidakseimbangan kondisi ekonomi antar berbagai wilayah. Jika hal ini terus dibiarkan, hal yang mengkhawatirkan justru dimana wilayah yang mempunyai pendapatan yang rendah cenderung diabaikan dalam hal pembangunan ekonomi yang dapat mendukung peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah yang bersangkutan (Harjadi & Komarudin, 2021). Akibatnya, kesenjangan distribusi pendapatan akan semakin besar dan dapat berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial serta menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kesejahteraan perekonomian memegang kunci dalam pembangunan ekonomi di seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia (Nurain & Juliannisa, 2022). Pada dasarnya, pembangunan ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan dan

menciptakan pembangunan suatu negara (Rahman & Putri, 2021). Menurut, Hariani (2019) penciptaan kesejahteraan membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang kuat serta pemerataan dalam distribusi pendapatan. Sebagai sebuah negara yang terdiri dari ribuan pulau, Indonesia tidak dapat menghindari risiko yang timbul akibat berbagai keberagaman karakteristik wilayahnya. Keberagaman ini mencakup perbedaan dalam budaya, bahasa, sumber daya alam, dan tingkat pembangunan ekonomi, yang semuanya dapat berpengaruh pada stabilitas sosial dan ekonomi.

Perbedaan karakteristik ini memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan struktur perkembangan ekonomi. Oleh karena itu, sangat wajar apabila pola perkembangan ekonomi di Indonesia bervariasi. Keberagaman ini berpengaruh pada motivasi untuk berkembang, yang pada akhirnya mengakibatkan beberapa daerah mengalami pertumbuhan yang pesat, sementara wilayah lainnya tertinggal dalam pertumbuhannya. Hal ini menciptakan perbedaan ekonomi yang besar dan keinginan untuk maju tersebut kemudian menyebabkan munculnya ketidakseimbangan dalam pembangunan dan pendapatan di antar daerah (Saraswati, 2020).

Kesenjangan adalah suatu masalah yang sangat rumit dan kompleks sehingga menjadi suatu realita dan isu yang sangat penting untuk segera ditinjau serta diatasi oleh negara-negara maju maupun negara-negara yang sedang berkembang. Kesenjangan distribusi pendapatan dapat didefinisikan sebagai distribusi yang tidak seimbang dari total pendapatan nasional di antara berbagai rumah tangga suatu negara (Istikharoh et al., 2020). Dengan kata lain, kesenjangan

distribusi pendapatan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai lapisan masyarakat yang mengakibatkan adanya perbedaan yang signifikan antara kelompok kaya dan kelompok miskin.

Kesenjangan distribusi pendapatan adalah isu penting bagi pembangunan di setiap negara. Kesenjangan distribusi pendapatan berkaitan dengan cara distribusi pendapatan yang diterima oleh masyarakat di suatu negara. Semakin tinggi kesenjangan distribusi pendapatan menunjukkan bahwa distribusi pendapatan dalam masyarakat semakin tidak seimbang. Akibatnya, hal ini akan memperbesar kesenjangan antara kelompok masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi relatif baik dengan mereka yang memperoleh pendapatan yang rendah (Febriyani & Aris, 2021).

Kesenjangan ini kenyataannya menjadi masalah dalam pembangunan manusia dan tidak bisa dihilangkan dalam pembangunan suatu daerah. Kesenjangan distribusi pendapatan bukan hanya terjadi dalam skala negara saja, akan tetapi juga bisa terjadi dalam skala regional yang luas (Khoirudin & Mustain, 2020). Kesenjangan ini terjadi karena sektor-sektor utama di suatu daerah hanya terfokus pada daerah-daerah tertentu saja. Meskipun pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya untuk membangun negara dan mengatasi masalah ketidakadilan ekonomi, kesenjangan ini tetap meningkat, terlebih terlihat pada tingginya angka kemiskinan serta perbedaan pendapatan di berbagai daerah di Indonesia.

Kesenjangan distribusi pendapatan memiliki dampak yang mengakibatkan berbagai kondisi, termasuk ketidakmerataan distribusi pendapatan yang tinggi bisa menimbulkan ketidakefisienan dalam perekonomian. Berdasarkan laporan bank

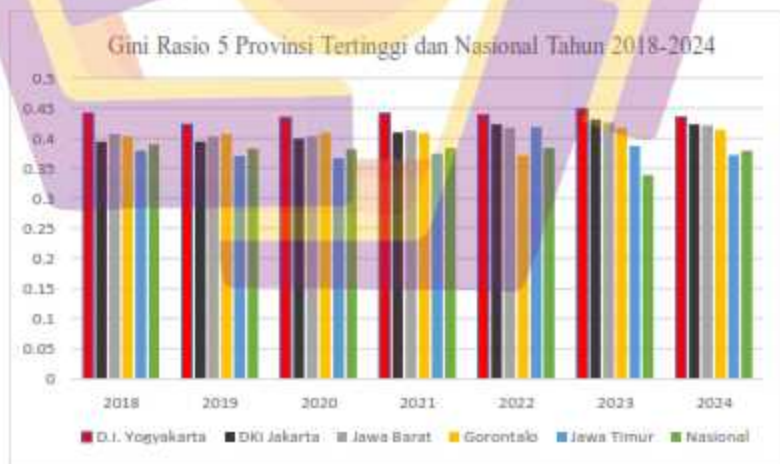
dunia tahun 2015, kesenjangan distribusi pendapatan di Indonesia mengalami peningkatan signifikan sejak tahun 2000. Fenomena ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi tidak dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, melainkan hanya 20 persen penduduk dengan penghasilan tertinggi.

Kesenjangan distribusi pendapatan berhubungan dengan distribusi pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara. Semakin tinggi kesenjangan distribusi pendapatan berarti akan memperparah kesenjangan (gap) antara masyarakat dengan kondisi ekonomi yang lebih baik dan masyarakat yang memiliki penghasilan rendah (Dondo et al., 2019). Namun, tingkat pendapatan ini juga merupakan bentuk dari ketidaksetaraan ekonomi di dalam masyarakat, yang mana hal tersebut dapat menyebabkan konflik sosial dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Kesenjangan distribusi pendapatan bukan hanya terjadi dalam skala negara saja, akan tetapi juga bisa terjadi dalam skala regional yang luas (Khoirudin & Mustain, 2020). Kesenjangan distribusi pendapatan di setiap provinsi di Indonesia masih terjadi dan perbedaannya tergolong cukup tinggi. Provinsi yang menunjukkan kesenjangan paling tinggi adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian, disusul oleh DKI Jakarta, Jawa Barat, Gorontalo dan Jawa Timur. Daerah Istimewa Yogyakarta yang hanya memiliki lima wilayah yang terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu kawasan dengan kesenjangan tertinggi di Indonesia. Fenomena ini dapat dipahami dari berbagai aspek, seperti tingginya konsentrasi pendidikan tinggi dan pariwisata yang

menarik investasi, tetapi tidak diikuti dengan pemerataan kesempatan kerja bagi seluruh lapisan masyarakat.

Untuk mengukur kesenjangan distribusi pendapatan di suatu wilayah, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan Indeks Gini atau Gini Rasio, yaitu merupakan ukuran yang umum digunakan untuk mengukur derajat atau menilai tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Nilai gini rasio berada antara 0 sampai dengan 1, dimana semakin besar nilai gini rasio menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan penduduk semakin tinggi. Hal ini berarti bahwa jurang ekonomi yang terjadi antara kelompok-kelompok di wilayah tersebut semakin luas. Ketika angka gini rasio mendekati 1, ini menunjukkan bahwa sebagian kecil dari populasi menguasai sebagian kekayaan, sementara sebagian besar masyarakat lainnya berada dalam kondisi yang jauh lebih rendah. Berikut ini adalah grafik gini rasio lima, yaitu sebagai berikut



Gambar 1. 1 Gini Rasio 5 Provinsi Tertinggi dan Nasional Tahun 2018-2024
Sumber; Badan Pusat Statistik, 2022-2024

Gambar diatas menunjukkan bahwa provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tingkat gini rasio tertinggi pada tahun 2018-2024. Menurut Badan Pusat Statistik, tingkat gini rasio di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu tujuh terakhir yaitu pada tahun 2018-2024 sangat tinggi daripada provinsi gini rasio tertinggi yang terdapat di Indonesia. Angka persentase tingkat gini rasio di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selalu berada diatas angka persentase tingkat gini rasio nasional. Tingginya kesenjangan ini menyebabkan dampak buruk dalam jangka panjang terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Berikut adalah grafik yang menunjukkan perkembangan Gini Rasio di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019-2024:



Gambar 1. 2 Gini Rasio Provinsi DIY Pada Tahun 2019-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019-2023

Tabel diatas menunjukkan Gini rasio tercatat sebesar 0,428 pada tahun 2019, lalu naik pada tahun 2020 sebesar 2,10%. Kemudian pada tahun 2021 turun sebesar 0,229%. Pada tahun 2022 naik kembali sebesar 5,28%, tahun 2023 turun sebesar 2,18% dan pada tahun 2024 turun 51,23%. Tabel diatas diambil dari data Badan

Pusat Statistik (BPS) gini rasio Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019-2024. Menurut Badan Pusat Statistik, angka gini rasio di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama kurun waktu enam tahun, yaitu pada tahun 2019-2024 selalu berada diatas angka gini rasio nasional.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kesenjangan distribusi pendapatan adalah upah minimum yang menjadi dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak (Rahman & Putri, 2021). Upah minimum bisa menjadi faktor yang berperan dalam menurunkan kesenjangan distribusi pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan dan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang tinggi dengan lingkungan pasar yang kompetitif (Hanum & Sarlia, 2019) . Melalui penetapan upah minimum yang cukup, pekerja di sektor-sektor dengan upah yang rendah akan mendapatkan penghasilan yang lebih baik, sehingga akan meningkatkan daya beli mereka dan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup mereka.

Penelitian Sutiono & Syafitri (2018) upah minimum mempengaruhi kesenjangan distribusi pendapatan karena dapat mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan di tingkat provinsi dan wilayah melalui peluang kerja yang baru. Naiknya upah minimum akan memberikan manfaat bagi individu yang aktif dalam perekonomian serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut penelitian Firdaus & Hasmarini (2023) menemukan bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesenjangan distribusi pendapatan berarti, apabila upah naik, maka kesenjangan distribusi pendapatan akan menurun. Ketika upah meningkat, hal ini berarti daya beli masyarakat

berperan dalam menentukan kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Upah minimum dianggap sebagai instrumen yang efisien untuk mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan. Upah minimum merupakan salah satu komponen yang menentukan kesejahteraan penduduk di suatu negara. Hal ini disebabkan karena upah minimum adalah pendapatan minimal yang diterima oleh pekerja, sehingga bisa menjadi indikator kemampuan pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.



Gambar 1. 3 Upah Minimum Provinsi DIY dan Nasional Pada Tahun 2019-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019-2024

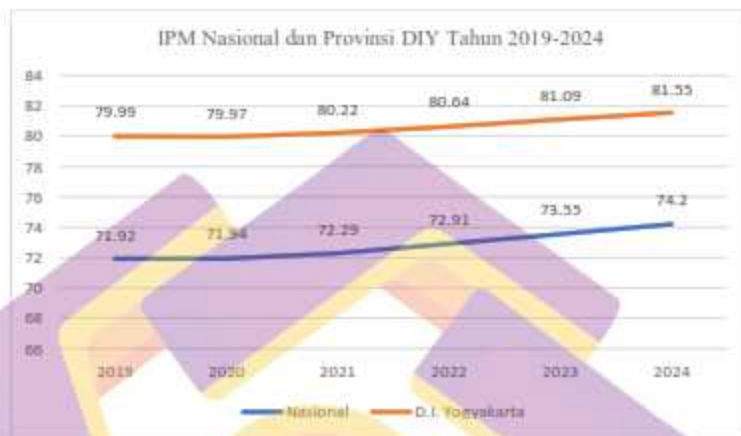
Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa dalam setiap tahun nya mengalami peningkatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2019, upah minimum ditetapkan sebesar Rp 1.570.923. Pada tahun 2020 naik sebesar 8,51%. Kemudian tahun 2021 naik kembali sebesar 3,54%. Pada tahun 2022 naik sebesar

4,30%, tahun 2023 naik sebesar 7,65% dan pada tahun 2024 naik sebesar 7,27%. Menurut Badan Pusat statistik, tingkat upah minimum di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu enam tahun terakhir yaitu pada tahun 2019-2024 selalu berada dibawah angka upah minimum nasional.

Faktor lain yang menyebabkan kesenjangan distribusi pendapatan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut Farhan & Sugianto (2022), Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi akan menurunkan kesenjangan distribusi pendapatan masyarakat. Hal ini dikarenakan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat mampu untuk menciptakan peluang ekonomi yang lebih merata. Sementara itu, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Marti'ah (2025) yang menyatakan bahwa IPM yang tinggi dapat menyebabkan meningkatnya kesenjangan. Hal ini terjadi karena ketika individu memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja, mereka akan mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang lebih baik. Sebaliknya, jika individu tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan, maka pendapatannya akan terbatas.

Indeks pembangunan manusia adalah indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam meningkatkan kualitas hidup atau kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Indeks Pembangunan Manusia dapat digunakan untuk menetapkan peringkat atau level pembangunan suatu daerah atau negara (Ismail et al., 2021). Selain itu, indikator ini mencerminkan kualitas hidup masyarakat melalui tiga aspek utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Kesenjangan ini kemudian berdampak pada perbedaan peluang dalam memperoleh pekerjaan, yang pada akhirnya memperburuk kesenjangan distribusi pendapatan. IPM antar

Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan pada tahun 2019-2024.



Gambar 1. 4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2019-2023 Provinsi DIY dan Nasional

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019-2023

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 tercatat Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 79,99. Kemudian pada tahun 2020 turun sebesar 0,025%. Pada tahun 2021, naik sebesar 0,31%. Kemudian pada tahun 2022 naik sebesar 0,52%, tahun 2023 naik sebesar 0,56% dan pada tahun 2024 naik sebesar 0,57%. Menurut Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia selama enam tahun terakhir yaitu pada tahun 2019-2024 selalu berada diatas angka persentase Indeks Pembangunan Manusia nasional.

Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan upaya pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas

hidup. Meskipun Indeks Pembangunan Manusia sering kali diartikan sebagai kesejahteraan masyarakat, kenyataannya, pertumbuhan yang tidak merata dalam bidang pendidikan dan ekonomi dapat memicu kesenjangan distribusi pendapatan yang lebih besar.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memiliki keragaman sosial dan ekonomi, terdapat kelompok masyarakat yang merasakan manfaat dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, sementara itu kelompok lainnya tetap terpinggirkan. Situasi ini menghasilkan kesenjangan yang signifikan antara mereka yang mempunyai akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang baik dan mereka yang tidak. Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta bisa dipengaruhi oleh beragam hal, seperti pertumbuhan sektor pariwisata, investasi pada infrastruktur, dan program-program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup.

Salah satu faktor utama yang berkontribusi dalam kesenjangan distribusi pendapatan adalah keberadaan penduduk miskin. Penduduk yang hidup dalam kemiskinan, diartikan sebagai individu atau kelompok yang tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan mendasar mereka. Sering kali terperangkap dalam siklus kemiskinan yang keras untuk diatasi. Mereka mengalami berbagai rintangan, termasuk akses yang terbatas terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja yang layak. Kendala-kendala ini tidak hanya berdampak langsung pada pendapatan mereka, tetapi juga memperburuk kesenjangan distribusi pendapatan yang lebih luas dalam masyarakat.

Menurut Kunenengan et al. (2023) kesenjangan distribusi pendapatan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah tingkat kemiskinan, karena jika kesenjangan pendapatan terus menerus terjadi, hal itu akan meningkatkan tingkat kemiskinan serta masalah ketidakmerataan dan kemiskinan saling berkaitan erat. Salah satu masalah yang sering dialami oleh negara-negara yang berkembang termasuk Indonesia adalah adanya perbedaan antara kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah serta masalah kemiskinan atau jumlah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan dan kesenjangan tidak hanya terjadi di wilayah pedesaan saja, akan tetapi juga di wilayah perkotaan. Kemiskinan dan kesenjangan distribusi pendapatan adalah dua masalah ekonomi yang berkaitan dan saling mempengaruhi. Kemiskinan dapat memperburuk kesenjangan distribusi pendapatan. Sementara kesenjangan distribusi pendapatan yang tinggi juga dapat memperpanjang tingkat kemiskinan.



Gambar 1. 5 Persentase Penduduk Miskin Provinsi DIY dan Nasional Tahun 2019-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019-2024

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa penduduk miskin mengalami fluktuasi. Diketahui bahwa pada tahun 2019 tercatat 11,70%, kemudian pada tahun 2020 naik 4,96%. Pada tahun 2021 naik 4,23%, lalu pada tahun 2022 turun 11,41%, tahun 2023 turun sebesar 2,65% dan pada tahun 2024 turun sebesar 1,90%. Menurut Badan Pusat Statistik, angka persentase penduduk miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu enam tahun terakhir yaitu pada tahun 2019-2024 selalu berada di atas angka persentase penduduk miskin nasional. Fluktuasi jumlah penduduk miskin yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti migrasi, perubahan ekonomi, dan kebijakan sosial, dapat berdampak signifikan terhadap kesenjangan distribusi pendapatan pada daerah ini.

Fluktuasi jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta sering kali disebabkan oleh migrasi penduduk dari daerah lain yang mencari peluang ekonomi yang lebih baik. Namun, tidak semua orang yang migrasi mampu memperbaiki kualitas hidup mereka. Banyak dari mereka yang terperangkap dalam sektor informal dengan pendapatan yang rendah, yang berkontribusi pada peningkatan jumlah penduduk miskin. Selain itu, faktor-faktor seperti tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya keterampilan, serta akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan dan sosial juga memperburuk kondisi mereka. Kenaikan kesenjangan distribusi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat disebabkan oleh kesenjangan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan.

Faktor lain yang menyebabkan kesenjangan adalah jumlah keluarga penerima manfaat. Jumlah keluarga penerima manfaat adalah keluarga yang mendapatkan bantuan sosial dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah memenuhi syarat

yang ditetapkan dalam keputusan (Siregar, 2021). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga yang miskin dan rentan (Kemensos RI, 2025). Tolak ukur sasaran penerima Program Keluarga (PKH) adalah masyarakat miskin yang berada di dalam kondisi rentan dan tercatat dalam data terpadu penanganan kemiskinan, yang mempunyai komponen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 mengenai Program Keluarga (Muin & Rosdiana, 2020).

Hubungan antara jumlah keluarga penerima manfaat dan kesenjangan distribusi pendapatan menunjukkan bahwa semakin banyak keluarga yang tergolong sebagai penerima manfaat, maka semakin kuat indikasi adanya kesenjangan pendapatan dalam masyarakat. Hal ini terjadi akibat bertambahnya jumlah keluarga penerima manfaat, menunjukkan besarnya proporsi penduduk yang hidup dalam kondisi ekonomi yang lemah serta bergantung pada bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan mereka. Berikut ini adalah grafik yang menggambarkan jumlah keluarga penerima manfaat di Provinsi DIY pada tahun 2019-2024:



Gambar 1. 6 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Provinsi DIY dan Nasional Tahun 2019-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019-2024

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa jumlah keluarga penerima manfaat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami fluktuasi. Diketahui pada tahun 2019, tercatat jumlah keluarga penerima manfaat sebesar Rp 302.591. Kemudian, pada tahun 2020, naik sebesar 17,36%. Pada tahun 2021 turun sebesar 5,13%, lalu tahun 2022 naik sebesar 574,69%, tahun 2023 turun sebesar 14,50% dan pada tahun 2024 turun sebesar 32,82%. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah keluarga penerima manfaat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu enam tahun terakhir yaitu pada tahun 2019-2024 selalu berada dibawah angka jumlah keluarga penerima manfaat nasional.

Fluktuasi jumlah keluarga penerima manfaat sosial di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah perubahan perubahan kondisi sosial ekonomi rumah tangga, seperti kenaikan pendapatan, kehilangan pekerjaan, atau pergeseran status pekerjaan informal ke

pekerjaan formal. Selain itu, akurasi data mengenai jumlah penduduk serta pembaruan data yang dilakukan secara rutin juga mempengaruhi jumlah keluarga yang tercatat sebagai penerima manfaat. Faktor lain yang juga berpengaruh adalah kebijakan pemerintah daerah dalam menetapkan syarat kelayakan serta efektivitas koordinasi antara lembaga yang terlibat dalam proses verifikasi dan validasi data.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas terkait pengaruh variabel bebas upah minimum, indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk miskin, dan jumlah keluarga penerima manfaat terhadap kesenjangan distribusi pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Determinan Kesenjangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”.

1.2. Rumusan Masalah

Kesenjangan distribusi pendapatan masih menjadi isu permasalahan ekonomi, yang berpengaruh tidak hanya pada stabilitas sosial, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Rata-rata kesenjangan distribusi pendapatan menunjukkan bahwa wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta berada di kategori tertinggi di Indonesia. Pada rentan waktu enam tahun terakhir, gini rasio Daerah Istimewa Yogyakarta menempati posisi tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Indonesia. Dengan demikian sangat penting untuk melakukan penelitian guna mengurangi kesenjangan ini hingga ke tingkat yang lebih rendah. Hal ini mendorong peneliti untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan distribusi pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan latar belakang, pertanyaan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Upah Minimum terhadap kesenjangan distribusi pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap kesenjangan distribusi pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk Miskin terhadap kesenjangan distribusi pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
4. Bagaimana pengaruh Jumlah Keluarga Penerima Manfaat terhadap kesenjangan distribusi pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum terhadap kesenjangan distribusi pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap kesenjangan distribusi pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk Miskin terhadap kesenjangan distribusi pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Keluarga Penerima Manfaat terhadap kesenjangan distribusi pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagaimana peran masyarakat penting dalam membantu menurunkan tingkat kesenjangan distribusi pendapatan yang nantinya akan menambah kesejahteraan masyarakat sekitar.

2. Bagi Pemerintahan

Penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan sebagai bahan pembandingan dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia, Jumlah Penduduk Miskin, dan Jumlah keluarga penerima manfaat terhadap kesenjangan distribusi pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Bagi Akademisi.

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan literasi bagi mahasiswa terkait pengaruh upah minimum, indeks pembangunan manusia, Jumlah penduduk miskin, dan Jumlah keluarga penerima manfaat terhadap kesenjangan distribusi pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai tugas akhir dan salah satu syarat kelulusan serta memperoleh gelar sarjana di Universitas Amikom Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman peneliti terkait pengaruh upah minimum, Indeks Pembangunan Manusia, Jumlah penduduk miskin, dan Jumlah keluarga penerima manfaat terhadap kesenjangan distribusi pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.5. Sistematika Bab

Adapun sistematika penelitian yang disusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini adalah uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian serta sistematika penulisan latar belakang masalah yang menjelaskan landasan pemikiran secara garis besar. Rumusan masalah menjelaskan hasil penelitian yang dicapai melalui proses penelitian. Sistematika penulisan menjelaskan tentang ringkasan dari setiap bab dalam skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini penjelasan mengenai uraian tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan hipotesis. Landasan teori dan penelitian terdahulu menjelaskan tentang penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Kerangka pemikiran adalah skema dalam bagan yang dibuat untuk memaparkan secara ringkas tentang permasalahan yang diteliti. Hipotesis merupakan pernyataan yang disimpulkan dari tinjauan serta jawaban sementara dari masalah penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini merupakan uraian tentang hal hal yang berhubungan dengan pengumpulan data dan pengolahan data. Uraian tersebut mengenai objek penelitian, jenis serta sumber data. Definisi operasional variabel penelitian, dan teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan uraian tentang analisis data sesuai dengan alat analisis dan teknik analisis yang digunakan. Pembahasan menggunakan hasil analisis sesuai dengan teknik yang digunakan serta argumentasi.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan uraian tentang kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian, pengolahan data, serta saran.

